

DEMONSTRASI MAHASISWA “TOLAK REFORMASI DIKORUPSI” DALAM AGENDA MEDIA TIRTO.ID

Muchammad Abdul Ghofur*
Herru Prasetya Widodo
Asra Bulla Junga Jara Jara
Fathul Qorib

Article History:

Received 4 February 2021

Received in revised form 19 April 2021

Accepted 26 April 2021

ABSTRACT

The online media Tirto.id presents a new face for reporting in Indonesia as relaxed, in-depth, and full of data. As a new media, Tirto.id has become one of the media that counts in Indonesia. Its peculiarity can be seen from its various news related to the government, including the news about student actions rejecting the KPK Law and the revision of the KUHP Law. This study aimed to reveal the media agenda of Tirto.id in reporting the demonstration titled #ReformasiDikorupsi and #GejayanMemal using the Agenda Setting theory. There were 14 news on Tirto.id from 18 September 2019 to 30 September 2019 were analyzed using the concepts of the Setting Agenda, namely visibility, audience salience, and valence. As a result, Tirto.id showed its support for the #ReformasiDikorupsi demonstration in various news sections, from the title, photo captions, and the content of the news. Tirto.id showed in its reporting that the government was negligent and so it was opposed by students who are positioned as ‘people’s representatives’. This research concluded that Tirto has a special agenda to reject the KPK Law and the amendments to the Criminal Code Law (KUHP) through news dictions to the selection of news sources. Tirto tried to monitor the government through his in-depth coverage.

Keywords: Corruption Reform; Media Agenda; Student Demonstrations; Tirto.id.

ABSTRAK

Media online Tirto.id hadir di Indonesia mengusung wajah baru pelaporan yang santai, mendalam, dan penuh data. Sebagai media baru, Tirto.id telah menjadi salah media yang diperhitungkan di tanah air. Kekhasannya tampak dalam berbagai berita yang bersinggungan dengan pemerintah, termasuk berita-berita terkait aksi mahasiswa yang menyuarkan penolakan terhadap UU KPK dan revisi UU KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap agenda media Tirto.id dalam pemberitaan demonstrasi bertajuk #ReformasiDikorupsi dan #GejayanMemanggil menggunakan teori Agenda Setting. Paling tidak ada 14 berita di Tirto.id sejak 18 September 2019 sampai 30 september 2019 yang dianalisis berdasarkan konsep-konsep Agenda *Setting*, yaitu *visibility*, *audience salience*, dan *valence*. Hasilnya Tirto.id menunjukkan keberpihakannya pada demonstrasi #ReformasiDikorupsi dalam berbagai bagian berita, mulai judul, caption foto, dan isi beritanya. Tirto.id menunjukkan dalam pemberitaannya bahwa pemerintah lalai sehingga dilawan oleh mahasiswa yang diposisikan sebagai ‘representasi rakyat’. Kesimpulan penelitian ini adalah Tirto memiliki agenda khusus menolak UU KPK dan perubahan UU KUHP melalui diksi berita hingga pemilihan narasumber berita. Tirto berupaya mengawasi pemerintah melalui liputan-liputan mendalamnya.

Kata kunci : Agenda Media; Demonstrasi Mahasiswa; Reformasi Dikorupsi; Tirto.id.

PENDAHULUAN

Media massa merupakan sarana atau wadah yang digunakan oleh para pemilik media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas di suatu wilayah, mengenai suatu kejadian dan keadaan di lingkungan sosial tertentu (Gani, 2005; Hajad, 2018). Media massa yang dimaksud dapat tergolong dalam beberapa jenis yakni media elektronik, cetak dan media *online*. Selain itu media massa juga merupakan suatu alat yang bergerak di ruang publik sesuai dengan kepentingan pengguna atau konsumennya, yang berdasarkan kegiatan utamanya yaitu, menghimpun, mengolah konten-konten simbolik dari partisipasi profesional terarah, dan tanpa pengaruh dari pemilik kepentingan individu atau kelompok manapun (Qorib, 2018).

Meski demikian media massa dalam ruang publik yang digunakan oleh masyarakat tidak hanya berperan dan berfungsi sebagai media informasi, namun dalam fungsi dan kepentingan lain, media massa memiliki fungsi sebagai sarana hiburan, pendidikan dan juga sebagai fungsi untuk mempengaruhi. Dengan adanya fungsi tersebut yang kita rasakan saat ini, tentunya tidak lepas dari agenda media massa yang dipengaruhi oleh pemiliknya (Khatimah, 2018).

Salah satu produk media massa yang penting adalah berita. Berita merupakan suatu laporan informasi dari kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat sehingga sering dikonsumsi oleh khalayak luas (Hikmat, 2018). Hal ini dikarenakan berita adalah salah satu sumber pendidikan dan juga referensi di berbagai bidang kehidupan. Berita yang disajikan oleh media massa memiliki beberapa topik seperti politik, sosial, masyarakat, pendidikan, budaya, hingga olahraga dan agama. Masing-masing materi tersebut sering dijadikan referensi dan bahan kajian oleh konsumen pada kalangan tertentu, seperti pebisnis, aktor politik, pelaku ekonomi dan sebagainya. Bahkan sebelum era globalisasi saat ini, kalangan masyarakat terendah sekalipun, membutuhkan informasi sebagai sumber ilmu pengetahuan tentang apa yang terjadi di lingkungan luar kehidupan sosialnya.

Media massa hadir dengan berbagai jenis dan kemasan yang berbeda-beda dengan tujuan untuk menarik perhatian dan minat konsumennya dalam mengonsumsi berita, baik di media cetak, maupun elektronik. Kini industri media massa kedatangan jenis media baru yang sangat memiliki perbedaan dengan media sebelumnya, sebut saja seperti media cetak, dan *elektronik*, koran dan radio serta televisi. Media pendatang baru tersebut adalah media *online*, atau biasa di kenal dengan media siber (*cyber media*). Media *online* merupakan media yang dalam penggunaannya menggunakan jaringan internet, baik dalam pengolahan informasi dan juga distribusi informasi kepada khalayak ramai (Nasrullah, 2016; Stier, Bleier, Lietz, & Strohmaier, 2018).

Media *online* sendiri bekerja dengan mengandalkan kecepatan yang dimiliki dalam menyampaikan informasi, karena media *online* secara sistem, menggunakan *website* sebagai sarana untuk mendistribusikan berita kepada konsumennya (Widodo, 2017). Selain itu media *online* juga dapat diakses dengan menggunakan *gadget* dan memungkinkan semua konsumen dapat dengan mudah menerima informasi secara cepat. Seperti layaknya media massa lainnya media siber juga memproduksi berita dalam berbagai topik seperti, politik, pemerintahan, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan juga agama (Manan, 2018).

Beragamnya media massa yang ada di Indonesia tentunya memiliki agenda serta pengaruh terhadap pemerintahan dan juga politik di Indonesia. Baru-baru ini terdapat demonstrasi mahasiswa



akibat adanya kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro kepada masyarakat. Media massa nasional, misalnya CNN dan *Detik.com* memiliki sajian-sajian berita terkait aksi demonstrasi mahasiswa dalam membandingkan kinerja pemerintah dan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa. Akibat dari itu mahasiswa turun ke jalan dengan melakukan demonstrasi dengan beberapa tuntutan. Setidaknya ada tujuh isu tuntutan mahasiswa, yaitu terkait rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), isu lingkungan, RUU ketenagakerjaan, RUU pertanahan, RUU PKS, dan kriminalisasi aktivis. Momen-moment demonstrasi mahasiswa kerap menjadi fokus media massa dalam pemberitaannya karena berkaitan dengan masyarakat luas (Marison, 2019; Yasmin, 2019).

Pemberitaan yang dilakukan oleh media massa ini merupakan satu pilihan khusus dari tim redaksi. Beberapa berita memiliki tujuan tertentu dan berita lainnya bisa jadi hanya rutinitas. Sehingga redaksi seringkali berhadapan dengan kode etik yang harusnya dia jaga malah terjerumus untuk menggadaikannya (Suhardi & Qorib, 2019). Jika suatu media memberitakan suatu peristiwa dengan tendensi tertentu maka dia sudah memasuki wilayah Teori Agenda Setting atau Agenda Media. Inti dari Teori *Agenda Setting* adalah media memberikan penekanan tertentu pada suatu peristiwa sehingga apa yang dianggap penting oleh media pada akhirnya dianggap penting pula oleh khalayak (Nasionalita, 2014). Penelitian tentang agenda media sudah dilakukan oleh akademisi Indonesia, misalnya (Tawaang, 2015) meneliti tentang empat surat kabar di Jakarta dan membuktikan bahwa ada keterkaitan antara agenda media dengan agenda masyarakat. Bahkan (Juditha, 2019) juga meneliti *hoax* di media sosial menggunakan Teori Agenda Setting dan mendapatkan hasil yang relevan antara agenda media dan agenda khalayak.

Oleh karena itu media massa sebagai penyampai pesan publik dapat berpengaruh secara positif dan negatif kepada pemerintah maupun masyarakat sebagai konsumen, karena secara tidak langsung media dapat mempengaruhi pikiran khalayak dalam berbagai hal, salah satunya penentuan kebijakan oleh pemerintah akan tuntutan demonstrasi mahasiswa (Sutrisman, 2019). Banyak media massa nasional yang tidak semuanya memberitakan terkait demo mahasiswa tolak reformasi dikorupsi atau menjadi agenda medianya. Seperti CNN dan *Detik.com* yang hanya memiliki agenda pemberitaan terkait demo mahasiswa dengan mengambil berita-berita terkait keberhasilan pemerintah dan membandingkan apa yang menjadi tuntutan mahasiswa ketika melakukan demonstrasi.

Hal inilah yang menjadi kelebihan khusus media Tirto yang berbeda dari media nasional lainnya. Berbeda dengan media Tirto yang memiliki agenda khusus untuk memberitakan demo mahasiswa tolak reformasi dikorupsi. Media Tirto juga lebih banyak berita yang menyoroti demo mahasiswa tolak reformasi dikorupsi dalam setiap liputannya selama masa demonstrasi berlangsung. Media Tirto hadir dengan tajuk “jernih, mengalir, mencerahkan” dalam perjalanannya menjadi media alternatif dari surat kabar konvensional. Hadir dengan tulisan-tulisan yang panjang dan juga mendalam, serta memiliki citra yang dibangun ialah informasi analisis, in-depth, data dan visual membuat Tirto.id menjadi media online berbeda dengan yang lain. Media online Tirto.id hadir untuk mengisi kekosongan media massa tanah air yang absen menyajikan liputan mendalam (*in-depth*) dan berbasis data (jurnalisme data). Kebanyakan media massa hanya menyajikan berita harian yang tidak dapat diidentifikasi kekhasannya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena ingin menjelaskan secara mendalam agenda media Tirto terkait pemberitaan #ReformasiDikorupsi. Metode ini dinilai lebih efektif untuk

mengungkap makna dibalik pemberitaan (Moleong, 2012). Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena sehingga dihasilkan sebuah data berupa kata-kata. Kualitatif juga dapat digunakan untuk menganalisis obyek penelitian yang membutuhkan kepekaan khusus sehingga makna yang terkandung dalam fenomena dapat ditangkap (Anggito & Setiawan, 2018; Suwendra, 2018)

Tabel 1. Isi Berita Tirto.id

No	Judul Berita	Tanggal muat
1	Demo mahasiswa di DPR Pakai Dana Publik Terkumpul RP 31 Juta Sehari	23 September 2019
2	Jokowi Dianggap Tak Pantas Digelari Putra Reformasi oleh Trisakti	24 September 2019
3	Reformasi Dikorupsi : Mahasiswa Bentrok dengan Aparat	25 September 2019
4	Reformasi Dikorupsi : Bentrok Polisi dan Demonstrasi di DPR	26 September 2019
5	Poster Demo Nyeleneh, Karena Urusan Personal juga Politis	27 September 2019
6	Komnas HAM : Polisi Berlebihan Menangkap Dhandy dan Ananda	27 September 2019
7	Yasonna Laoly Mundur Tuai Kecamatan Sebab Abaikan Polemik RUU KUHP	28 September 2019
8	Massa Alumni 212 Serukan Turunkan Jokowi Saat Demonstrasi	28 September 2019
9	Sampai Kapan Polisi Tutup Akses Soal Mahasiswa Ditahan Hilang	28 September 2019
10	Satu Mahasiswa di Makassar Kritis Tertabrak Mobil Taktis Polisi	28 September 2019
11	Mendikbud Terbitkan Surat Edaran Larang Siswa Ikut Demo	28 September 2019
12	Wiranto Didesak Mundur sebagai Menkopolkam dan Itu Wajar Belaka	29 September 2019
13	Aksi #GejayanMemanggil2 Besok di Jogja Bakal Diikuti Ribuan Orang	29 September 2019
14	Kasus Dhandy Laksono, Ananda Badudu, Lampu Kuning untuk Demokrasi	29 September 2019

Data primer didapatkan oleh peneliti dengan cara dokumentasi dari pemberitaan demo mahasiswa tolak reformasi dikorupsi di media Tirto.id pada tanggal 18 September 2019 sampai 30 September 2019. Dalam berita Tirto terkait dengan reformasi dikorupsi, ada 14 berita yang akan diteliti dengan rincian 9 berita yang memiliki judul yang menyerang pemerintah, polisi, menteri, dan pendukung pemerintahan. Sedangkan 5 berita lainnya memiliki judul yang lebih *soft* tetapi memiliki isi berita yang menonjolkan bahwa terjadinya demonstrasi karena kegagalan pemerintah dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memudahkan analisis dalam penelitian ini, pembahasan akan difokuskan pada tiga elemen agenda media yaitu *visibility*, *audience salience*, dan *valence*. Ketiganya merupakan indikator yang relevan untuk menunjukkan aktivitas media massa yang memiliki agenda tertentu.

Visibility

Visibility diartikan sebagai jumlah dan tingkat menonjolnya berita (Kriyantono, 2014). Media massa memiliki keleluasaan untuk memuat atau tidak memuat suatu berita yang semuanya dapat dihubungkan dengan ideologi media. Jika suatu peristiwa terjadi maka media massa yang diwakili oleh tim redaksi akan melakukan pengategorisasian sehingga menghasilkan liputan yang tidak merugikan media. Seringkali, liputan ini harus mendukung visi perusahaan beserta orang-orang di dalamnya.

Dalam beberapa konteks, penonjolan yang dilakukan media massa bisa meliputi keseringan berita itu muncul, ditulis panjang lebar hingga detail, diletakkan di *headline* untuk media massa cetak, ditayangkan pada *primetime* untuk media elektronik, atau dengan meletakkan gambar yang besar dan berwarna. Semua ini merupakan bentuk penonjolan yang sering dilakukan media massa untuk menunjukkan kepentingan dari suatu berita.

Menurut (Littlejohn & Foss, 2014) ada dua tingkatan dalam penyusunan agenda media. Pertama, media massa akan menentukan isu-isu umum dari sebagian besar peristiwa yang ada. Isu umum ini harus ditentukan terlebih dahulu agar terjadi penyamaan persepsi di antara tim redaksi. Pada tingkatan ini terjadi pemikiran yang panjang dari redaksi berdasarkan pengalaman dan pola-pola kerja yang selama ini terjadi di redaksi. Sehingga dari sekian banyak peristiwa yang terjadi secara bersamaan, sebuah media harus menentukan satu yang layak diangkat menjadi berita.

Tingkatan berikutnya setelah memilih isu umum adalah menentukan bagian-bagian kecil dari isu tersebut yang layak diangkat menjadi berita pilihan dari hari ke hari. Isu umum biasanya terdiri dari banyak bagian peristiwa yang tidak tunggal sehingga harus dipilah lagi dalam bagian-bagian yang kecil. Setelah semuanya sudah masuk akal bagi tim redaksi, berita akan di *push* dengan melibatkan banyak wartawan sehingga mendapatkan gambaran besar dari peristiwa.

Dalam konteks media Tirto.id, akhir bulan September banyak memberitakan terkait demonstrasi mahasiswa yang menolak perubahan Undang-undang KPK dan Rancangan Undang-undang KUHP. Pilihan ini diambil karena Tirto ingin berpihak pada mereka yang non-pemerintah yang menolak perubahan undang-undang dengan tajuk *#ReformasiDikorupsi* dan *#GejayanMemanggil*. Sangat terlihat keberpihakan Tirto pada kelompok yang kontra dengan pendapat umum pemerintah sehingga banyak berita yang secara khusus terus menyoroti 'kelalaian' pemerintah dan 'semangat demonstran' membela kebenaran dan rakyatnya.



Gambar 1 Berita Tirto tanggal 23 September 2019 berjudul “Demo Mahasiswa di DPR Pakai Dana Publik Terkumpul RP 31 Juta Sehari”.

Berita di atas pertama-tama yang ingin ditonjolkan adalah spanduk-spanduk yang dibawa mahasiswa dan ditempel di gerbang Gedung DPR RI Jakarta. Dengan tulisan ‘Gedung Ini Disita Mahasiswa’, Tirto juga ingin menyampaikan ke publik bahwa mahasiswa memiliki tingkatan yang lebih tinggi dibanding anggota dewan sehingga ia bisa ‘menyita’ gedung DPR RI. Siapapun tau bahwa mahasiswa tidak mungkin bisa melakukannya, tetapi pesan yang ingin disampaikan oleh Tirto melalui foto tersebut adalah ‘mahasiswa’ sebagai kaum intelektual memandang anggota dewan tidak becus mengurus undang-undang sehingga harus digulingkan dan gedungnya disita oleh masyarakat.

Ungkapan-ungkapan ‘KPK wafat’ dan ‘Mahasiswa Bersama KPK’ juga menunjukkan bahwa Tirto ingin sekali mengatakan perubahan undang-undang KPK telah membunuh KPK. Kata ‘wafat’ sendiri berarti meninggal dengan tenang dan dalam kondisi baik, sehingga yang dipakai adalah wafat bukannya tewas atau mati. KPK dianggap sebagai makhluk suci yang kewafatannya akan menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat yang ditinggalkannya, yaitu berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Judul yang menjadi pembuka berita ini pun menunjukkan keberpihakan Tirto pada demonstran yang menolak UU KPK dan RUU KUHP. Dengan mengatakan bahwa demonstrasi dilakukan dengan dana publik yang telah terkumpul sebanyak 31 juta dalam satu hari, berita ini menginformasikan bahwa publik, yang berarti rakyat Indonesia, setuju dengan demonstrasi tersebut. Buktinya masyarakat rela menyumbang hingga 31 juta dalam satu hari hanya untuk demonstrasi. Masyarakat seolah-olah menitipkan perjuangan pada mahasiswa untuk demo mahasiswa.

Dari berita-berita yang ada, ada dua berita yang menggunakan judul ‘Reformasi Dikorupsi’ secara

lugas, yaitu ‘Reformasi Dikorupsi : Mahasiswa Bentrok dengan Aparat’ dan ‘Reformasi Dikorupsi : Bentrok Polisi dan Demonstan di DPR’. Kedua berita tersebut mengindikasikan bahwa Tirto ingin memberikan gambaran bahwa pemerintah atau di dalamnya adalah politisi di DPR telah menggerogoti reformasi yang berdiri sejak tumbangnya masa kepemimpinan Soeharto. Tetapi orang-orang di pemerintahan yang merupakan bagian dari reformasi malah melakukan korupsi terhadap reformasi itu sendiri. Kondisi ini merupakan pengkhianatan terhadap reformasi yang menandai kebebasan berserikat, berkumpul, dan berorganisasi di Indonesia.

Berita pada gambar 2 merupakan salah satu berita yang menjadi penanda isu demonstrasi dengan hastag #ReformasiDikorupsi. Judul tersebut jelas menyebut bahwa reformasi telah dikorupsi. Oleh siapa? Dari berita-berita yang ada maka jawabannya telah bahwa pemerintah melakukan korupsi pada dirinya sendiri. Harusnya yang menjaga reformasi adalah pemerintah dengan tetap menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tetapi Tirto melihat KPK dilemahkan sehingga mahasiswa bergerak melakukan demonstrasi.



Gambar 2. Berita Reformasi Dikorupsi di Tirto

Kedatangan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi dinilai ingin menyelamatkan negara Indonesia dari lemahnya reformasi, demokrasi, dan pemberantasan korupsi. Sebenarnya berita foto tersebut tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah dan aparat pemerintah. Isi beritanya menjelaskan secara singkat bagaimana terjadinya bentrokan antara mahasiswa dan polisi :

“Kericuhan bermula saat mahasiswa mencoba masuk ke gedung DPR dan berusaha merobohkan pagar. Polisi mengurai massa dengan menembakkan gas air mata dan water canon. Mahasiswa di depan gerbang gedung, terdorong keluar. Mereka lari ke arah jalan tol dalam kota depan gedung DPR”

Diuraikan dengan jelas dalam berita tersebut bahwa mahasiswa yang memancing persoalan dengan masuk ke gedung DPR secara paksa. Bahkan mahasiswa berusaha merobohkan pagar yang menjadi pemisah antara halaman kantor anggota perwakilan rakyat itu dengan massa pendemo di luar. Akibatnya polisi menembakkan gas air mata dan *water canon*. Aksi bentrokan ini diceritakan oleh Tirto dengan obyektif dan tidak menutupi kesalahan massa dari mahasiswa, padahal dalam pola berita secara umum Tirto memilih membela mahasiswa.

Dari informasi ini dapat satu kesimpulan bahwa berita di Tirto juga memberikan wawasan kepada pembacanya ketika membaca isi beritanya. Namun layaknya pembaca pada umumnya, seringkali hanya melihat judul dan gambar, atau paling panjang adalah membaca lead-nya saja tanpa membaca isi berita secara keseluruhan. Membaca berita hingga tuntas harus dilakukan agar pembaca memiliki pemahaman yang menyeluruh dan tidak mudah tertipu dengan judul yang *click bait*.



Gambar 3. Berita di Tirto dengan judul “Reformasi Dikorupsi : Bentrok Polisi dan Demonstan di DPR” pada tanggal 26 September 2019.

Berita Tirto kali ini juga dengan lugas memberi judul ‘reformasi dikorupsi’. Sebagaimana berita sebelumnya, judul ini menggambarkan bahwa ada suatu hal baik yaitu reformasi, tetapi dikorupsi. Korupsi bukan persoalan sepele di Indonesia. Mengapa istilah korupsi menjadi suatu hal yang amat penting? Karena korupsi dilakukan dengan memanfaatkan jabatan dan legitimasi yang diberikan kepada orang tertentu untuk menguntungkan dirinya sendiri dan golongan, sementara masyarakat secara umum merugi. Hal inilah yang bisa merasionalisasi mengapa isu ‘reformasi dikorupsi’ ada dan terus dikawal.

Pada foto berita di atas, Tirto juga melakukan penguatan *frame* terhadap tulisan di kaos salah satu peserta demo ‘Hapus Pasal Ngawur, DPR Perlu Tidur’. Tirto membuat agenda bahwa anggota DPR rata-rata tidak memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi untuk mengerjakan undang-undang sehingga harus didemo. Selain itu juga, DPR juga dianggap lebih baik tidur dibanding ketika bangun. Karena ketika bangun anggota dewan malah berbuat ‘ngawur’, dan lebih baik tidur sehingga tidak menimbulkan kerusakan lebih jauh lagi.

Audience Salience

Audience Salience berhubungan dengan tingkat menonjolnya suatu berita yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Berita yang ada di media massa harus mengupayakan tingkat keterbacaan di masyarakat sehingga tujuan dari pemuatan berita itu dapat mencapai pembacanya. Dalam berita-berita Tirto, tim redaksi tampak sudah menyasar bahwa pembacanya adalah orang-orang yang tidak selalu setuju dengan kebijakan pemerintah yang represif. Khususnya dalam UU KPK yang dianggap melemahkan KPK maka Tirto berada pada sisi di seberang pemerintah.

Berita yang dimuat oleh Tirto memiliki nuansa kontra pemerintah yang jelas dari beberapa judul yang diambil pada akhir Bulan September 2019. Judul-judul itu seperti ‘Aksi #GejayanMemanggil2 Besok di Jogja Bakal Diikuti Ribuan Orang’ dan “Kasus Dhandy Laksono, Ananda Badudu, Lampu Kuning untuk Demokrasi”, serta “Sampai Kapan Polisi Tutup Akses Soal Mahasiswa Ditahan Hilang” menunjukkan adanya berita-berita yang tidak selalu setuju dengan pemerintah. Bahkan Tirto secara berani terus melakukan kritik terhadap pemerintah terkait dengan tindakan represif aparat dalam kasus demonstrasi dalam hastag #ReformasiDikorupsi.

Untuk melihat *audience salience* ini membutuhkan data akurat di lapangan terkait dengan pembaca Tirto. Pembaca Tirto bisa dilihat di pengikut media sosial Twitter @TirtoID yang selalu berkomentar terkait dengan agenda-agenda Tirto. Banyak sekali komentar yang mendukung Tirto dan turut serta kontra dengan pemerintah. Pada satu sisi hal ini menunjukkan bahwa berita-berita yang ada di Tirto sudah cukup memenuhi kebutuhan pembacanya. Terjadi dua timbal balik yang saling memengaruhi antara Tirto dan pembacanya. Hal itu juga terjadi pada teori agenda setting, bahwa antara media dan pembacanya saling terikat dan memengaruhi.

Berdasarkan berita-berita #ReformasiDikorupsi yang dimuat oleh media ini, Tirto menunjukkan keterkaitannya dengan khalayak pembacanya. Misalnya, Tirto berharap pembacanya dapat mendukung aksi menolak RUU KUHP dalam pemberitaan bahwa aksi #GejayanMemanggil akan diikuti ribuan demonstran.



Gambar 4. Berita Tirto berjudul Aksi #GejayanMemanggil2 Besok di Jogja Bakal Diikuti Ribuan Orang

Dalam berita Tirto ini terdapat makna tersirat bahwa KPK merupakan kebanggaan generasi muda Indonesia. Seluruh aksi demonstrasi di dominasi generasi muda yang menginginkan perubahan secara mendasar pada negara Indonesia. Perubahan yang diharapkan oleh mahasiswa tersebut harus dibarengi dengan penguatan KPK sebagai representasi dari keadilan di Indonesia. Jika KPK dikebiri dan tidak

diberikan kewenangan yang sama sebagaimana undang-undang sebelumnya maka KPK akan 'wafat' sebagaimana berita di Tirto lainnya.

Judul 'Akan Diikuti Ribuan Orang' merupakan informasi, ajakan, dan peringatan bahwa akan ada rakyat bergerak untuk membela kepentingan masyarakat. Pembaca yang memiliki kecondongan kontra pemerintah maka pasti akan memanfaatkan *moment* seperti ini, lalu bersama-sama turun ke jalan menuntut reformasi yang bersih dari korupsi. Masyarakat yang peduli dengan masa depan Indonesia juga akan tertarik untuk mengikuti aksi demo tersebut sehingga dapat menyuarakan pendapatnya. Di sinilah peran Tirto membangun kebutuhan untuk pembacanya yang sudah dipetakan sejak awal.

Pada gambar 5, dalam berita tersebut dijelaskan mengenai aksi #GejayanMemanggil2 yang menolak rancangan perundang-undangan yang akan disahkan oleh pemerintah. Inisiator dari gerakan ini adalah Aliansi Rakyat Bergerak yang akan turun ke jalan membawa misi penolakan terhadap rencana pengesahan tersebut. Banyak sekali rancangan undang-undang yang akan ditolak dalam aksi itu, seperti RUU Pertanahan, Ketenagakerjaan, RKUHP, dan undang-undang pemberantasan korupsi.



Gambar 5. Kutipan berita di Tirto dengan judul "Aksi #GejayanMemanggil2 Besok di Jogja Bakal Diikuti Ribuan Orang"



Gambar 6. Berita penangkapan salah satu aktivis Dandhy Laksono dan Ananda Badudu di Tirto.

Gambar 6 dalam pemberitaan Dhandy Laksono dan Ananda Badudu yang ditangkap polisi, Tirto mempertanyakan komitmen pemerintahan Joko Widodo pada demokrasi. Digambarkan dalam berita tersebut bahwa pemerintahan membungkam orang-orang yang tidak pro pemerintah, ‘menggelandang’nya ke kantor polisi. Tirto juga mengutip wawancaranya kepada beberapa tokoh dari lembaga yang sudah memiliki *record* membela kebebasan demokrasi, dan tentu saja kontra pemerintah.

Misalnya KontraS yang sejak berdirinya terus mengadvokasi orang-orang hilang dalam perpolitikan Indonesia, diwawancarai terkait kasus Dhandy dan Ananda. Maka jawabannya jelas KontraS akan menolak segala upaya pembungkaman terhadap demokrasi dengan cara penjemputan paksa. Apalagi polisi menjemput Dhandy pada pukul 23.00 WIB dan menjemput Ananda pada pukul 04.30 WIB. Tirto juga mengutip wawancara dari jurnalis Joni Aswira dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang menyatakan bahwa penangkapan Dhandy bisa menjadi sinyal bahwa polisi sebagai pasukan keamanan akan merespon situasi politik di Indonesia dengan pembungkaman.

Dalam agenda Tirto, berita ini diharapkan dapat menyedot perhatian masyarakat agar mendukung Dandhy, Ananda, maupun demonstrasi menolak UU KPK dan RUU KUHP. Tetapi berita-berita tersebut tidak berhasil membuat followers twitter TirtoID, karena komentar-komentar yang mengiringi berita tersebut kontraproduktif dengan yang diharapkan Tirto. Banyak sekali komentar bahwa Dandhy pantas ditangkap polisi karena telah menjadi prosedur dan ketetapan setiap negara untuk memperlakukan orang yang dicurigai.

Beberapa komentar juga mengaitkan Dandhy dengan Papua yang akibat cuitannya, Papua semakin

kacau. Bahkan Dandhy dan Ananda disebut sebagai ‘provokator pantas diciduk’. Meskipun ada tanggapan lain bahwa apapun yang dilakukan warga negara ketika dianggap salah maka polisi bisa memanggilnya dengan prosedur yang berlaku, tidak diciduk begitu saja tanpa surat panggilan. Banyak sekali tanggapan di Twitter yang berkaitan dengan berita-berita Tirto, dan kesemuanya membatalkan agenda media Tirto.

Valence

Valence atau valensi dalam *teori agenda setting* berarti bahwa media massa memiliki cara pemberitaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi khalayaknya. Berita-berita yang ada di media massa seringkali secara emosional menginformasikan peristiwa yang bisa membuat hati khalayaknya ikut berempati. Dalam banyak hal berita media massa seringkali membawa dampak psikologis bagi pembaca. Sehingga berita-berita media perlu memperhatikan kesenangan dan ketidaksesuaian dari khalayak. Berita yang bisa mengeksplorasi kesenangan khalayaknya pasti akan terus dibaca dan dikonsumsi yang pada gilirannya meningkatkan rating media tersebut.

Pemberitaan media massa Tirto juga mengagendakan cerita-cerita tertentu yang mengakomodasi kepentingan salah satu sisi khalayaknya. Khalayak yang ingin dipuaskan oleh Tirto juga memiliki kedekatan dengan isu-isu yang dipilih Tirto untuk diangkat. Dalam pemberitaannya terkait #DemokrasiDikorupsi, Tirto banyak mengeksplorasi berita-berita yang kontra terhadap pemerintah. Hal itu bisa dilihat dari judul-judul yang dipilih oleh Tirto maupun isi beritanya. Misalnya dalam konteks berita demonstrasi, “Kasus Dhandy Laksono, Ananda Badudu, Lampu Kuning untuk Demokrasi; Satu Mahasiswa di Makassar Kritis Tertabrak Mobil Taktis Polisi; Komnas HAM : Polisi Berlebihan Menangkap Dhandy dan Ananda”.



Gambar 7 Berita terkait #DemokrasiDikorupsi di Tirto berjudul ‘Komnas HAM :
Polisi Berlebihan Menangkap Dhandy dan Ananda’.



Dari judul yang diusung Tirto, terlihat bahwa ia ingin membela Dandhy dan Ananda Badudu yang ditangkap oleh polisi pada jam malam dan dini hari. Polisi dinilai berlebihan oleh Tirto. Tirto menggunakan suara tokoh Komnas HAM yang diwawancarnya, yang menjelaskan bahwa polisi *excessive use of force* atau penggunaan kewenangan secara berlebihan. Penilaian itu dilakukan karena ada kekhawatiran bahwa demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia bisa ternodai gara-gara kejadian tersebut. Harusnya keduanya dipanggil dengan wajar karena tidak memiliki catatan buruk di kepolisian dengan statusnya sebagai saksi.

Struktur berita yang dibuat oleh Tirto terkait berita tersebut tergambar jelas terkait agenda Tirto yang membela Dandhy dan khalayak yang berada di belakang Dandhy ataupun Ananda. Apalagi sejak terjadi demonstrasi menuntut tidak disahkannya UU KPK, RUU KUHP, Ketenagakerjaan, dan lain-lain, terjadi gelombang massa yang kontra terhadap pemerintah. Sehingga Tirto pada satu sisi sebenarnya memiliki khalayak pendukung di media sosial maupun secara psikis untuk dipuaskan dengan berita-berita yang berpihak kepada mereka. Keberpihakan ini boleh dibilang kepada rakyat, masyarakat umum, atau berpihak kepada kelompok kontra pemerintah secara khusus.

Banyak hal yang diungkap di atas sebenarnya sudah menunjukkan pola agenda Tirto yang ingin kontra dengan pemerintah. Argumen yang dibangun di dalam pemberitaan dengan cara mencari narasumber yang punya pemikiran sepaham dengan ideology Tirto. Jelas terlihat, keberpihakan Tirto pada isu demokrasi, revolusi, hak asasi manusia, kekerasan, dan penggunaan kekuasaan secara berlebihan. Sehingga peristiwa apapun yang ada di Indonesia dan berkaitan dengan hak asasi manusia akan mendapatkan perhatian dari Tirto. Perhatian ini adalah bagian penting dari agenda supaya bisa memengaruhi masyarakat. Ketika masyarakat sudah terpengaruh maka kebijakan pemerintah terhadap isu-isu itu akan mengalami pergeseran.

SIMPULAN

Media massa dalam melaksanakan aktivitasnya harus menggunakan dasar-dasar jurnalistik yang ketat sehingga menghasilkan pemberitaan yang akurat dan obyektif. Tetapi kenyataannya, banyak media yang tidak merefleksikan realitas yang sesungguhnya sehingga berpotensi untuk membohongi publik. Cara-cara yang biasa digunakan adalah dengan seleksi realitas yang akan dimuat dalam rubrik yang telah mereka siapkan. Pemilihan inilah yang membuat media memiliki agendanya sendiri sehingga dapat memengaruhi agenda publik.

Dalam penelitian ini, Tirto juga melakukan politik agenda setting untuk memuat berita-berita yang berhubungan dengan #ReformasiDikorupsi. Hal ini bisa dilihat dalam tiga tingkatan, yaitu *visibility*, *audience salience*, dan *valence*. *Visibility* adalah bagaimana media massa menonjolkan peristiwa dalam pemberitaannya guna memengaruhi agenda publik. Tirto melakukan penonjolan berita terkait dengan tajuk demokrasi dikorupsi dengan mengawal informasi tersebut secara terus menerus. Hal ini sama dengan prinsip pertama dalam agenda setting yaitu menetapkan satu agenda umum untuk banyak peristiwa yang terjadi.

Tirto menetapkan agenda medianya untuk meliput berita-berita yang berkaitan dengan demonstrasi menolak RUU KUHP, UU KPK, serta undang-undang lainnya. Hal ini adalah sebuah pilihan yang harus dijalani meskipun pilihan peristiwa lainnya juga banyak. Kondisi ini sebenarnya menunjukkan Tirto memiliki agenda khusus berkaitan dengan demonstrasi. Dengan judul yang selalu mengarah

pada kritik pemerintah serta pemilihan sumber-sumber wawancara yang kontra pemerintah, DPR, dan penegak hukum, maka Tirto terlihat berada pada media yang di luar pemerintah. Ia mengawasi pemerintah dengan seksama melalui liputan mendalamnya, terutama berkaitan dengan undang-undang yang waktu itu ramai dibicarakan.

Dalam *agenda setting*, media massa juga memperhatikan *audience salience*, yaitu tingkat penonjolan berita di media yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat khalayaknya. Khalayak tertentu memiliki kebutuhan tertentu yang tidak sama dengan khalayak lainnya. Tirto misalnya memiliki khalayak pembacanya sendiri yang harus dipuaskan dengan berita-berita khusus. Sebagaimana pemberitaan soal reformasi dikorupsi di Indonesia, pembaca Tirto pasti memiliki referensi tersendiri bagaimana Tirto akan memberitakannya.

Menurut analisis yang telah dilakukan, berita-berita Tirto seharusnya sudah memenuhi kebutuhan khalayaknya. Tetapi kasus followers Twitter @TirtoID berlaku sebaliknya, banyak sekali yang memaklumkan apa yang dikerjakan pemerintah dan mempertanyakan pemberitaan Tirto. Hal ini sebenarnya kontraproduktif dengan apa yang diberitakan Tirto. Ketika membicarakan kekuasaan yang disalahgunakan atau kekuasaan yang berlebihan dalam salah satu berita penangkapan aktivis oleh polisi, followers dari @TirtoID malah membela polisi, bahkan cenderung menghujat sang aktivis dan Tirto sendiri.

Tahap terakhir dalam agenda media adalah *valence*, yang berarti sebuah berita harusnya menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi masyarakat. Berkaitan dengan masalah emosional ini, Tirto memberitakan banyak hal yang bisa memenuhi emosional pembacanya, terkhusus di persoalan reformasi dikorupsi. Berita yang dihadirkan Tirto bisa memuaskan dan menyenangkan pembacanya karena mengakomodasi kepentingan khalayak Tirto terhadap hak asasi manusia, hukum yang berpihak pada masyarakat kecil, isu lingkungan yang penuh penindasan terhadap rakyat, atau penyusunan undang-undang yang bermasalah.

Kesimpulannya, Tirto banyak menginformasikan berita-berita untuk mendukung agendanya sendiri berkaitan dengan ideologi media; bahwa undang-undang yang direvisi atau dibuat oleh pemerintah seringkali menyengsarakan rakyat sehingga Tirto menolaknya. Hal itu ditunjukkan dengan judul berita yang kontra pemerintah, termasuk pemilihan narasumber khusus yang tidak secara obyektif menggambarkan permasalahan secara bebas dan independen. Ada kalanya agenda media tersebut dapat memengaruhi agenda publik, tetapi sering terjadi sebaliknya malah menjadi kendala bagi media tersebut.

Tirto harus mengupayakan penyediaan berita yang obyektif dengan tetap mempertahankan independensinya. Karena berita-berita yang dimuat oleh Tirto terlihat jelas kontra dengan pemerintah dengan menimbulkan preseden buruk bagi media massa yang harusnya obyektif, independen, dan tidak berat sebelah. Tirto sebagai media massa nasional harus memberikan informasi yang akurat, independen, dan obyektif sehingga menjadi contoh bagi media massa lainnya. Berita-berita di media Tirto sudah merepresentasikan keberpihakan kepada publik tetapi melupakan obyektifitas sebagai esensi jurnalisme.

Penelitian lebih lanjut diperlukan terutama untuk mengukur agenda publik berkaitan dengan agenda media Tirto. Karena agenda publik dalam teori ini biasanya dipengaruhi oleh agenda media. Penelitian

secara mandiri dan khusus juga perlu dilakukan yang berkaitan dengan perubahan agenda kebijakan yang dipengaruhi oleh agenda media dan agenda publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: Jejak.
- Gani, R. (2005). *Media Massa dalam Masyarakat Madani*. Mediator: Jurnal Komunikasi, 6(1), 35–42. <https://doi.org/10.29313/mediator.v6i1.1174>
- Hajad, V. (2018). *MEDIA DAN POLITIK (Mencari Independensi Media Dalam Pemberitaan Politik)*. SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.35308/source.v2i2.295>
- Hikmat, M. M. (2018). *Jurnalistik: Literary Journalism*. Bandung: Kencana.
- Juditha, C. (2019). *Agenda Setting Penyebaran Hoaks di Media Sosial*. Jurnal Penelitian Komunikasi, 22(2), 155–168. <https://doi.org/10.20422/jpk.v22i2.669>
- Khatimah, H. (2018). *Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat*. Tasamuh, 16(1), 119–138. <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v16i1.548>
- Kriyantono, R. (2014). *Teknik Praktis Riset komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2014). *Teori Komunikasi : Theories of Human Communication (T. oleh M. Y. Hamdan, Ed.)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Manan, A. (2018). *Ancaman Baru Dari Digital*. Retrieved from Laporan Tahunan AJI website: https://aji.or.id/upload/article_doc/Laporan_Tahunan_AJI_2018_-_Ancaman_Baru_dari_Digital_OK21.pdf
- Marison, W. (2019). Tak Hanya 7 Tuntutan, Kini Demo Mahasiswa dan Buruh Ajukan “7+1 Tuntutan Reformasi Dikorupsi.” Retrieved August 30, 2020, from Kompas.com website: <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/28/18433071/tak-hanya-7-tuntutan-kini-demo-mahasiswa-dan-buruh-ajukan-71-tuntutan?page=all>
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasionalita, K. (2014). *Relevansi Teori Agenda Setting Dalam Dunia Tanpa Batas*. Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna, 5(2), 156. <https://doi.org/10.30659/jikm.5.2.156-164>

- Nasrullah, R. (2016). *Teori dan Riset Media Cyber (Cybermedia)*. Jakarta: Prenada Media.
- Qorib, F. (2018). *Teknik Reportase dan Penulisan Berita*. Malang: Intrans Publishing.
- Stier, S., Bleier, A., Lietz, H., & Strohmaier, M. (2018). Election Campaigning on Social Media: Politicians, Audiences, and the Mediation of Political Communication on Facebook and Twitter. *Political Communication*, 35(1), 50–74. <https://doi.org/10.1080/10584609.2017.1334728>
- Suhardi, & Qorib, F. (2019). *Advokasi Wartawan Korban Kekerasan Di Aliansi Jurnalis Independen Malang*. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 1(1), 10–17. <https://doi.org/10.33366/jkn.v1i1.4>
- Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Jakarta: Guepedia Publisher.
- Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Bali: Nilacakra.
- Tawaang, F. (2015). *Agenda Media Surat kabar (Analisis Isi Surat kabar Ibukota)*. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 19(1), 73–80.
- Widodo, Y. (2017). *Menyoal Etika Jurnalisme Kontemporer: Belajar dari OhmyNews*. *Jurnal ASPIKOM*, 1(1), 41. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v1i1.7>
- Yasmin, P. (2019). Ini 7 Tuntutan Mahasiswa yang Demo di Depan DPR. Retrieved August 30, 2020, from Detik.com website: <https://news.detik.com/berita/d-4722609/ini-7-tuntutan-mahasiswa-yang-demo-di-depan-dpr>